

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM
MENINGKATKAN PENGHASILAN NELAYAN TRADISIONAL
DI KECAMATAN PESISIR TENGAH**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

ARDIAN NUR

NPM: 1621020176

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM
MENINGKATKAN PENGHASILAN NELAYAN TRADISIONAL
DI KECAMATAN PESISIR TENGAH**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

ARDIAN NUR

NPM. 1621020176

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I

: Drs. Susiadi AS.,M.Sos.I

Pembimbing II

: Frenki, M.Si

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana. Kabupaten Pesisir Barat memiliki panjang garis pantai lebih kurang 210 km yang terbentang dari Kecamatan Bengkunt di bagian selatan sampai Kecamatan Lemong di bagian utara adalah merupakan wilayah yang sangat potensial untuk di kembangkan baik di sektor kelautan maupun di sektor perikanan. Melihat kenyataan ini, pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berperan serta dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ada dua yaitu bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah yaitu melakukan pembinaan dan pendampingan, memberikan sarana dan prasarana peralatan penangkapan, sosialisasi penggunaan peralatan tangkap, dan membantu nelayan dalam hal pemasaran hasil tangkapan. Analisis fiqh siyasah telah sesuai dengan *siyasah tanfidziyyah* antara hubungan pemimpin, rakyat dan lembaga dengan melaksanakan Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan tugas dan fungsi secara berkeadilan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol.H. Suratin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi
sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Ardian Nur

NPM : 1621020176

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah

Judul : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PESIRIR BARAT DALAM

MENINGKATKAN PENGHASILAN NELAYAN

TRADISIONAL DI KECAMATAN PESIRIR

TENGAH

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Susiadi AS.,M.Sos.I
NIP. 195808171993031002

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011002

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Lel. Kol.H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM MENINGKATKAN PENGHASILAN NELAYAN TRADISIONAL DI KECAMATAN PESISIR TENGAH"**, disusun oleh, **ARDIAN NUR, NPM: 1621020176**, program studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 02 Desember 2020**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H

Sekertaris : Erik R. Gumiri, M.H

Penguji I : Muhammad Yasir Fauzi, S.Ag. M.H

Penguji II : Drs. Susiadi A.S., M.Sos.I

Penguji III : Erenka, M.Si



Dekan

**Dr. K.H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardian Nur
NPM : 1621020176
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM MENINGKATKAN PENGHASILAN NELAYAN TRADISIONAL DI KECAMATAN PESISIR TENGAH”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 Oktober 2020

Penulis

Ardian Nur

1621020176

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi maha melihat.*

(Qs. An-Nisaa [4]: 58)

PERSEMBAHAN

Segala syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya. Atas doa dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan tepat pada waktunya, oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Lekat Yuswandi dan Ibuku Nur Laela, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kepada kedua adikku Devi Wahyuni dan Agus Latami dan kepada keluargaku dimanapun berada terimakasih atas doa dan dukunganya yang telah diberikan.
3. Terimakasih untuk penyemangatku Hefliza Berti yang sudah sabar mendampingi penulis dari tahap pertama sampai selesai.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Ardian Nur seorang anak laki-laki yang dilahirkan di desa Pekon Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tepatnya pada tanggal 19 juni 1997 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri bapak Lekat Yuswandi dan Ibuk Nur Laela. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Penggawa V Ulu, Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2010.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pesisir Tengah, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pesisir Tengah. Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2016.
4. Pada tahun yang sama 2016 penulis sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung program Strata Satu (1) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayahnya serta petunjuk dan limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM MENINGKATKAN PENGHASILAN NELAYAN TRADISIONAL DI KECAMATAN PESISIR TENGAH”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan nikmat dan taufiknya dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, aamiin.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Sarjana Satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini banyak mendapat bantuan semua pihak dalam proses penyelesaiannya. Tidak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada:

1. Bapak prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairudin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. Susiadi AS.,M.Sos.I selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis sejak awal perkuliahan dan banyak memotivasi serta meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Frenki, M.Si selaku pembimbing II yang meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada perpustakaan daerah Provinsi Lampung dan kepada perpustakaan Fakultas Syari'ah atas di perkenankanya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan
8. Kepada Bapak Mukhlazim S.Pd.,MM Sekertaris Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat yang telah membantu penulis dalam melakukan riset atau penelitian.
9. Ayah dan ibu yang selalu memberikan perhatiannya, doa, dukunganya, serta kasih sayang dan semangat.
10. Saudara-saudariku yang telah memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
11. Sahabat-sahabatku di UIN Raden Intan Lampung terkhusus Prodi Hukum Tata Negara kelas B angkatan 2016.
12. Sahabat-sahabat KKN ku kelompok 236 Desa Datar Labuay Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus.

Demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fukultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Aamiin Yarobbal alamin.

Bandar Lampung, 18 September 2020

Penulis

Ardian Nur

NPM 1621020176

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikasi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkup	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	20
B. Peningkatan Kesejahteraan Menurut Fiqh Siyasah	24
C. Nelayan.....	35
1. Pengertian Nelayan.....	35
2. Klasifikasi Bentuk Nelayan	36

3. Nelayan Tradisional.....	41
D. Tinjauan Pustaka	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Pesisir Barat	48
1. Struktur Organisasi.....	49
2. Tugas dan Fungsi	51
3. Dasar Hukum dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi	54
B. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat di Kecamatan Pesisir Tengah.....	56
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Kelautan dan Perikanan Pesisir Barat dalam Memenuhi Kesejahteraan Nelayan Tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah.....	63

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam Meningkatkan Penghasilan Nelayan Tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah.....	72
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam Meningkatkan Penghasilan Nelayan Tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul skripsi ini terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul. Sebab kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini.

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah berjudul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam Meningkatkan Penghasilan Nelayan Tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah”** maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) dan sebagainya agar dapat mengetahui fakta peristiwa yang sebenarnya yang berdasarkan sebab musabab dan pokok perkaranya.¹

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan,

¹Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), h. 32

dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan dan sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemashalahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dijalaninya.²

Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, komunikasi, dan sebagai penyelesaian masalah yang dilakukan oleh lembaga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.³

Meningkatkan Penghasilan Nelayan Tradisional adalah masalah kesejahteraan terkait dengan pendapatan ekonomi nelayan di tataran keluarga yang bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana.⁴

Berdasarkan uraian beberapa istilah yang terdapat dalam judul diatas maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah meninjau peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah kemudian di analisis menurut fiqh siyasah.

²Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 11

³Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 22

⁴Sastrawidjaya, *Nelayan dan Kemiskinan* (Jakarta: Pradnya Paramita Jakarta, 2002), h. 12

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Sebagian masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah bermata pencarian sebagai nelayan tradisional, mereka belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan sebagai nelayan tradisional.

2. Alasan Subjektif

- a. Penulis melihat pokok bahasan dalam skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari pada jurusan yang sedang di tempuh saat ini, yaitu jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).
- b. Daerah penelitian sangat mudah di jangkau, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang mendukung baik teori (buku-buku) atau data lapangan.

C. Latar Belakang

Laut Indonesia merupakan salah satu yang paling luas di dunia. Keluasannya yang sudah termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diperkirakan kurang lebih 5,8 juta kilometer dengan panjang garis pantai seluruhnya 80,790 kilometer atau 14% panjang garis pantai di dunia.⁵

⁵Endri Yunita, Pargito, "Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Pantai Labuhan Jukung Krui Pasca Terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat". *Jurnal Studi Sosial*, Vol. 6 No.1 (2018), h. 3

Indonesia memiliki sebagian masyarakat berprofesi sebagai nelayan yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada potensi kelautan. Jumlah nelayan Indonesia menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2017 yaitu berjumlah 2,7 juta orang dan hampir 85% nelayan di Indonesia didominasi oleh perikanan skala kecil yang beroperasi di sekitar perairan pantai.⁶

Masyarakat nelayan merupakan bagian salah satu masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengelola potensi sumber daya perikanan. Kebijakan dan implementasi program-program pemberdayaan untuk masyarakat nelayan hingga saat ini masih belum optimal dalam pendapatan dan kesejahteraan mereka.⁷ Hal ini disebabkan karena belum terealisasinya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana usaha perikanan dan usaha pengaraman.⁸

Fiqh siyasah yang ajarannya karakteristik dan komprehensif, yang mencakup segala aspek kehidupan didalamnya seperti pada *siyasah tanfidziyah* yang membahas proses pelaksanaan segala bentuk peraturan yang berfungsi

⁶Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2006), h. 3-4

⁷Fanesa Fargomeli, "Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tiwil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur". *Jurnal Acta Diuma*, Vol III. No. 3 (2014), h. 1

⁸Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pasal 18 ayat (1)

sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan masyarakat juga memandang terkait dengan masalah ini.⁹ Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar hubungan mereka dengan rakyat senantiasa terajut dengan baik adalah berlaku adil dan memerhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisaa [4]:58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (النِّسَاء: ٥٨).

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*¹⁰

Ayat ini berisi perintah Allah Swt agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya, kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat serta di janjikan kepada seluruh masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau kelas tertentu.

Masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang identik dengan nelayan merupakan bagian dari masyarakat terpinggirkan yang masih terus bergulat dengan berbagai persoalan kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Kondisi kehidupan yang memprihatinkan terutama secara pendapatan, dengan penghasilan yang selalu tergantung pada kondisi

⁹Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasaht Doktrin* h. 12

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h.

alam, maka akan sulit untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Pembangunan dikawasan pesisir pada umumnya dikaitkan dengan pendapatan nelayan yang kehidupannya selalu bergantung pada usaha perikanan.¹¹

Pola hidup masyarakat nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dalam menjalani sepanjang tahun yaitu jika sumber daya ikan melimpah otomatis mereka bakal meraup keuntungan lewat penangkapan, dan olahan tradisional. Sebaliknya, bila paceklik atau tidak bisa melaut karena gelombang air laut yang tinggi mereka tak punya sumber penghidupan. Jalan pintasnya mereka mengutang pada juragan atau rentenir. Imbasnya, mereka tak pernah naik kelas dari pendapatan rendah.¹²

Pendapatan rendah pada nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah ini, dimana nelayan bukan karena ketidak mampuan untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si nelayan dapat bekerja. Struktur sosial tersebut ternyata tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah yakni Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya maupun pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas perlu sekiranya diteliti tentang peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam

¹¹Eliya Safitri, Budiyono,” Karakteristik Sosial Ekonomi Nelayan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat”. *Jurnal Penelitian Geografi*, Vol. 1 No. 7 (2013), h. 2

¹²Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir* (Bandung: Humaniora, 2006), h. 20

¹³Endri Yunita, Pargito, Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan.... Vol 6, No 1 (2018)

meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah kemudian di analisis menurut fiqh siyasah.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah dan pandangan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah yang akan di teliti :

1. Bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah ?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah ?

F. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, selain itu arah penelitian juga ditentukan oleh tujuan penelitian.¹⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang dirumuskan di atas yakni:

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah.
- b. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah.

G. Signifikasi Penelitian

Esensialnya suatu penelitian dilakukan dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun orang lain. Hasil ini diharapkan dapat memberikan maafaat dalam berbagai hal, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan terutama tentang peningkatan penghasilan nelayan tradisional.

- b. Manfaat Praktis

¹⁴Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017), h. 89

1. Bagi Pemerintah

Agar mendapat perhatian lebih dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat terhadap masyarakat nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat bisa mengetahui pentingnya suatu pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah.

H. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah tentu bagian yang tidak kalah penting adalah metode penelitian agar dalam pelaksanaan dan hasil penelitian nantinya dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya secara keilmuan.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁵ Dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, data yang diteliti adalah data dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Data

¹⁵Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 12

diperoleh dengan melalui wawancara dengan nelayan dan Dinas Kelautan dan Perikanan secara bebas dan terpimpin namun di pimpin oleh kerangka pertanyaan. Sedangkan untuk data sekunder penulis mencarinya dari buku-buku fiqh dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubunganya dengan pokok permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, deskriptif yaitu metode mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada dengan mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.¹⁶ Yang disajikan dalam bentuk kata dan gambar, berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini deskriptif kualitatif.

2. Sumber Data

Data adalah informasi untuk berpikir gambalang (*eksplisit*), kemungkinan pemecahan persoalan atau keterangan-keterangan sementara yang sudah disusun haruslah diuji melalui pengumpulan data yang relevan atau ada kaitanya.¹⁷

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari pengumpulan data dilakukan dengan cara empirik yaitu berdasarkan

¹⁶*Ibid*, h. 29

¹⁷*Ibid*, h. 111

fakta di lapangan melalui wawancara mendalam dengan memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang mewakili.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku-buku, catatan kuliah Undang-Undang Kementrian Kelautan dan Perikanan dan dari beberapa jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan dengan judul penelitian.¹⁸

3. Populasi dan Sample

Populasi dan sampel memberikan peran penting dalam penelitian, agar memudahkan penulis dalam menentukan metode penelitian ketika dalam suatu penelitian yang membahas permasalahan yang sama dalam lingkup luas, dan memakan banyak waktu apabila dikerjakan satu persatu.

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, dan sebagainya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah nelayan

¹⁸Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Stastik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2004), h.

tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat yang berjumlah 460 orang.¹⁹

b. Sample

Sample adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu dan juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat di anggap mewakili populasi.²⁰

Tujuan peneliti mengambil sample adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.

Teknik sampling (pengambilan sampel) yang dipakai adalah *porposive sampling* yakni pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.²¹ Oleh karenanya agar sangat objektif, penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan dan tujuan penelitian. Krateria yang pantas dijadikan sampel penelitian adalah 9 orang.

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pesisir Barat
2. Ketua Nelayan Kecamatan Pesisir Tengah

¹⁹Susiadi, *Metodologi Penelitian*....h. 120

²⁰*ibid*

²¹Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*....h.

3. Nelayan Tradisional Kecamatan Pesisir Tengah

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian²²

a. Wawancara (*Interview*)

Adapun responden yang di wawancarai atau diminta informasi dan data adalah masyarakat nelayan yang mewakili populasi nelayan setempat. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat agar peneliti mendapatkan data atau informasi terkait peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah.

b. Observasi

Penulis melakukan observasi ke lapangan untuk menggali informasi dan data dari masyarakat nelayan melalui pengamatan langsung dilapangan agar mendapatkan data atau informasi terkait peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat terhadap nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti namun melalui dokumen-dokumen yang

²²Susiadi, *Metodelogi Penelitian*.... h. 134

diajukan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya.²³

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu, pengelolaan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pengecekan data yang telah dikumpulkam karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.
- b. *Tabulasi* atau sering diartikan sebagai proses penyusunan data dalam bentuk tabel. Pada tahap ini data telah dianggap telah selesai diproses, dan oleh karenanya, harus segera disusun kedalam suatu pola format yang telah dirancang. Lewat tabulasi data lapangan akan tampak ringkas dan terangkum. Tabulasi adalah pekerjaan membuat tabel, jawaban-jawaban yang telah diberi kode kategori jawaban kemudian dimasukan ke dalam tabel.²⁴

6. Analisis Data

Analisis data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka.

²³*Ibid*, h. 170

²⁴*Ibid*, h. 182

Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian tersebut. Data mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, video, dokumen pribadi dan resmi.²⁵ Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat di tarik kesimpulan yang jelas.

Analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintauan peneliti atas suatu gejala yuridis atau cara untuk menentukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan, dalam menganalisis data digunakan kerangka berpikir secara deduktif.

Metode deduktif yaitu suatu cara berfikir yang terangkat dari pengetahuan umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum itu, lalu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus dari suatu hal atas kasus.²⁶ Penulis maksud disini yaitu penulis menggambarkan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah.

²⁵Susiadi, *Metodelogi Penelitian*....h. 7

²⁶Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 32

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkup

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah paham yang mendalam. Menurut istilah fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).

Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama mujtahidin untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga hukum Islam karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (Ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (Muamalah).²⁷

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan

²⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 3

kebijaksanaan.²⁸ Pengertian pembahasan ini menisyratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengatur perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemshalahatan serta mengatur keadaan.²⁹ Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemshalahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah yaitu mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia pada kemashalahatan.³⁰

Menurut Imam al-Bujairimi fiqh siyasah adalah memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.

Menurut Imam Ibn Abidin mendefenisikan siyasah adalah kemashalahatan untuk manusia dengan menunjukannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akherat. Siyasah berasal dari Nabi baik secara khusus maupun umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Ibn al-Qayim yang dinukilnya dari Ibn' Aqil menyatakan siyasah juga suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan

²⁸Ibn Manzhur, *Lisan Al Arab* , juz 6 (Beirut: Dal al-Shadr, 1968), h. 108

²⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Darul-Anshar, 1977), h. 4-5

³⁰Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz 6 h. 362

dan terhindar dari kerusakan walaupun Rosul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukannya dan siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara'.³¹

Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada asalnya ada dua jenis siyasah, yaitu siyasah dzalimah yang diharamkan syara' dan siyasah adilah yang menegakkan kebenaran, menolak berbagai kejahatan, kerusakan dan mewujudkan tercapainya tujuan syariat. Syara' berkewajiban untuk merujuk pada siyasah adilah dan menjadikannya sebagai sandaran dalam menegakkan kebenaran.³²

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam fiqh siyasah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pihak yang mengatur dan pihak yang di atur. Dilihat dari unsur-unsur yang terlihat dalam proses fiqh siyasah, maka ilmu ini mirip dengan ilmu politik, seperti yang dikatakan Wirjono Prodjodikoro bahwa:

³¹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Wali Pers, 1993), h. 25

³²Irwantoni, "Peran Siyasah Syar'iyah dalam Memahami Nas-Nas Agama". *Jurnal Al Adalah*, Vol. X No. 3 Januari 2012, h. 270

Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu Negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, fiqh siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati, fiqh siyasah syar'iyah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.³³

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-Undangan)
2. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
3. *Siyasah Qadha'iyyah* (Peradilan)
4. *Siyasah Harbiyyah* (Hukum Perang)
5. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).

³³H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2013), h. 28

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu:

1. *Siyasah Qadha'iyyah* (Peradilan)
2. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara)
3. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
4. *Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Shar'iyyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

1. Peradilan (*Siyasah Qadla'iyyah*)
2. Hubungan Internasional (*Siyasah Idariyyah*) dan
3. Keuangan Negara (*Siyasah Maliyyah*).³⁴

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum).
3. *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara).

³⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi* h. 14

6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iiyyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan).
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iiyyah* (Politik Peperangan).³⁵

Contoh lain dari pembedangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syari'ah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam empat bidang, yaitu:

1. Fiqh dustury
2. Fiqh dawly
3. Fiqh maliy
4. Fiqh harbiy

Pembedangan-pembedangan di atas tidak selayaknya di pandang sebagai pembedangan yang telah selesai. Pembedangan fiqh siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Dalam fiqh tersebut berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan:

- a. *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi, permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup

³⁵ *Ibid*, h. 15

pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyyah biasanya di batasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Contoh negara yang menganut siyasah dusturiyyah yaitu negara Indonesia, Iran dan lain-lain. Misalnya membayar pajak tepat waktu, pembuatan identitas kewarganegaraan seperti pembuatan KTP, SIM, dan akta kelahiran.

- b. *Fiqh siyasah dauliyyah*, dauliyyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan siyasah dauliyyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurus kaum dzimi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum dzimi, hudud, dan qishash. Fiqh yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari Negara lain. Contoh negara yang menganut siyasah dauliyyah yaitu negara Iran, Malaysia, dan Pakistan. Meskipun tidak sepenuhnya penduduknya beragama Islam.
- c. *Fiqh siyasah maliyyah*, fiqh yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Maka, dalam fiqh siyasah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Dalam suatu kalangan rakyat, ada dua

kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan miskin. Fiqh siyasah ini membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, antara kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar. Adapun negara yang menganut fiqh maliyyah adalah semua negara. Contohnya: RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Negara).

- d. *Fiqh siyasah harbiyyah*, siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan denganya, seperti perdamaian. Fiqh siyasah harbiyyah ini meliputi pengertian dari fiqh siyasah itu sendiri serta tujuan dan macam-macam peperangan dalam Islam, kaidah-kaidah peperangan dalam Islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan melalui perdamaian.³⁶
- e. *Fiqh siyasah tanfidziyyah*, menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dalam istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau khalifah. Istilah *ul al-amir* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan yang lebih luas lagi. Namun di karenakan praktek pemerintahan Islam yang tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas melaksanakan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharuj* (dewan pajak), *diwan al-Ah Das*

³⁶J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah....* h. 39-41

(kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-Bait al-Mal* (pejabat keuangan) dan sebagainya yang telah ada sejak masa ke khalifahan Umar bin Khattab. Berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, umat Islam di Perintahkan untuk mentaatinya dengan syarat lembaga eksekutif ini tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya.³⁷

B. Peningkatan Kesejahteraan Menurut Fiqh Siyasah

Ulil amri adalah sebuah jabatan atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan dan bentuk-bentuk lainnya. Penguasa mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang di tetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Pemipin suatu negara bertugas dalam mewujudkan kemashalatan bagi negara serta megurusi masalah negara demi kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Adanya negara, adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas gelar sukarela.³⁸

Sebagaimana kehidupan masyarakat muslim mengangkat kepala negara hukumnya wajib, hal itu bertujuan mengatur rakyatnya supaya dapat terbina dengan baik maka di bentuk suatu negara yang berdasarkan Al-Qur'an dan maupun sunnah. Memahami makna ulil amri, di kalangan musafir terjadi variasi interpretasi. Ahmad Mustapa al-Maraghi menyatakan mereka terdiri dari para umara, hakim, ulama, panglima perang dan semua pemimpin rujukan

³⁷Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), h. 247

³⁸H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*.... h. 13

umat dalam masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dan kemashalahatan umum. Muhammad Abduh menjelaskan mereka adalah *al-halli wa al-aqdi* yakni orang-orang yang mempunyai pengaruh dimasyarakat, semisal panglima perang, ulama para pemimpin negara dan tokoh-tokoh bangsa, para pemikir partai, dan para pelopor kemerdekaan.

1. Prinsip-Prinsip Ulil Amri

Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bernegara. Diantaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat seperti di bawah ini sebagai dasar dan prinsip ajaran Islam dan kepemimpinan negara, sebagai berikut:

- a. Prinsip musyawarah (*syuro*)
- b. Prinsip ketaatan kepada pemimpin
- c. Prinsip keadilan
- d. Prinsip persamaan
- e. Prinsip kebebasan beragama³⁹

Prinsip-prinsip kepemimpinan negara yang akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut;

a. Prinsip Musyawarah (*Syuro*)

Informasi di dalam Al-Qur'an, dalam hal ini pemimpin atau ulil amri diharuskan bermusyawarah sebelum memutuskan segala urusannya.

Prinsip musyawarah ini termasuk penentuan pemimpin negara. Hal ini

³⁹Munawir Szadjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta UI-Pres, 1993), h. 4

terlihat ketika Rasulullah wafat, beliau tidak meninggalkan pesan tertentu bagaimana cara menentukan kepala negara pemerintahan sepeninggal beliau. Ayat Al-Qur'an juga tidak menentukan bentuk pemerintahan. Cara memilih kepala negara atau pemimpin, dan lain sebagainya. Cuma ada ayat yang menyuruh umat islam mengadakan *syuro*, musyawarah dalam berbagai urusan.

Implementasi musyawarah dalam islam diperlukan jelas oleh nabi SAW selaku kepala negara madinah. Bahkan, Nabi telah menjelaskan prinsip musyawarah ini sebagai dasar dalam sistem pemerintahannya.⁴⁰ Praktek musyawarah dalam sepanjang islam mengambil bentuk yang berbeda-beda dalam sistem negara monarki Islam masa silam. Misalnya, musyawarah dilakukan melalui raja dengan meminta pendapat dari pembantu-pembantu dekatnya. Setelah mempertimbangkan pendapat-pendapat itu, kemudian raja mengambil keputusan. Adapun zaman demokrasi republik yang termasuk dalam negara Islam, musyawarah dilakukan melalui suatu badan perwakilan rakyat. Daripada itu, cara pengambilan keputusan berbeda-beda oleh sebab itu ajaran tentang musyawarah bersifat universal.

b. Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin

Merupakan suatu keniscayaan dalam negara, bagi rakyatnya untuk mentaati penguasa. Disini Undang-Undang politik Islam hanya memerintah setiap warga negara untuk mentaati penguasa selama masa

⁴⁰Bustanudin Agus, *Al-Islam Buku Pedoman Kuliah Untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1993), h. 134

pemerintahannya tidak melanggar syariat Islam. Berdasarkan dengan prinsip ini sangat jelas bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah anjuran dalam Al-Qur'an.

c. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu perintah paling banyak dalam Al-Qur'an. Prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh suatu pemimpin dalam pemerintah. Apapun bentuk pemerintahan itu. Allah Swt memerintahkan agar pemimpin menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanaya dan menetapkan hukum dengan benar, dan apabila seorang pemimpin mengingkari atau dengan kata lain pemimpin tidak berlaku adil maka hukum Allah yang akan memberi pengajaran. Seseorang harus berlaku adil seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴¹

⁴¹ Departemen Agama RI.... h. 86

Berdasarkan ayat di atas hendaknya seorang penguasa harus bertindak adil terhadap rakyatnya, sesuai dengan garis-garis besar haluan Islam. Sebagaimana yang dikatakan Al-Mawardi dalam buku monumentalnya *Al-ahkam as-hulihaniyah* menjelaskan bila seorang penguasa keluar dari keadilan, maka ia harus di singkirkan dari kursinya dan dilarang mentaati perintahnya.

d. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan maksudnya setiap individu memiliki hak kebebasan dan kewajiban yang sama dan ini tidak memandang perbedaan aqidah, nasab, dan lain-lain. Ini terlihat pada suatu ketika seorang wanita tertangkap basah saat mencuri, kemudian para sahabat meminta Nabi menerapkan hukum potong tangan. Tetapi Nabi murka dan berkata: “Demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku kan potong tannya” (*H.R. Ahmad*).

A. Hasyim dalam bukunya mengatakan bahwa “kemerdekaan manusia persamaan hak dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan kehidupan politik. Baru terjamin apabila masyarakat manusia itu sendiri kuat, sehingga sanggup menjalankan asas-asas yang mulia dan sanggup pula mencegah orang-orang jahat dalam segala kaliber dari tindakan memperkosa hak-hak tersebut”.⁴²

⁴²A.Hasyimi, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 220

Islam mengharuskan seorang muslimin untuk menjalankan prinsip persamaaan dalam arti luas, tanpa adanya suatu pembatasan atau pengecualian dalam bentuk apapun.

e. Prinsip Kebebasan Beragama

Dalam memandang kebebasan atau kemerdekaan ini Islam sangat menjaminnya, sebab kebebasan adalah fitrah manusia, sehingga tiap warga negara untuk berpikir, berbuat, berpendapat selama dalam hal-hal yang tidak melanggar aturan. Hal ini dikarenakan kebebasan merupakan nilai yang paling berharga bagi manusia yang diciptakan oleh Allah atas fitrahnya.

Undang-Undang politik Islam menjamin kemerdekaan dan kebebasan setiap warga negara untuk berpikir, berbuat, berbicara dan berpendapat selama dalam hal-hal yang tidak dilarang Al-Qur'an dan sunnah. Sebab kebebasan merupakan nilai yang paling berharga bagi manusia yang diciptakan Allah atas fitrahnya. Ini dibuktikan oleh Rosul saat mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, dimana beliau tidak menyalahkan pendapatnya untuk berjihad.

2. Syarat-Syarat Ulil Amri atau Penguasa

Al-Qur'an dan sunnah, paling sedikit sebelas syarat ulil amri atau penguasa dalam Islam, kesebelas syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Seorang laki-laki

- c. Sudah dewasa
- d. Adil
- e. Pandai menjaga amanah dan professional
- f. Kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas
- g. Seorang warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara Islam
- h. Cinta kebenaran
- i. Mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi dan program-programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan.
- j. Cerdas dan memiliki ingatan yang baik, sehingga ia bukan hanya ingat tetapi juga terikat berbagai ajaran dan aturan yang disosialisasikan kepada publik
- k. Keturunan Quraisy, suku asal nabi Muhammad Saw. Syarat ini tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, tetapi hanya didapatkan dalam beberapa hadis.⁴³

Al-Qur'an memandang bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang harus ditangani. Pemerintahan dalam Islam bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Islam tidak membenarkan pemilikan aset kekayaan negara hanya berputar di sekitar orang-orang kaya semata. Ini merupakan

⁴³ Muzar Ibnu Khamami Zada....h. 248-263

amanat Islam kepada penguasa. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi.⁴⁴

Kata siyasah juga dapat dilihat dari sisi terminologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang mengatakan siyasah berarti mengatur segala sesuatu dengan membawa kemaslahatan. Beberapa ahli juga mengartikan sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.⁴⁵ Adapun konsep keadilan dalam Islam, yakni menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dalam menetapkan hukum maka dengan harus seadil-adilnya, memberikan hak kepada yang berhak hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nissa [4]: 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْدَا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*⁴⁶

⁴⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*.... h. 338

⁴⁵Imam Amrusi Jailani, et. al. *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: Iain Sunan Ampel Press, 2013), h. 3

⁴⁶Depertemen Agama RI... h. 79

Berdasarkan ayat di atas hendak seseorang menyampaikan sesuatu berlandaskan keadilan dan penuh tanggung jawab sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Fiqh siyasah maliyyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-Qur'an, sunnah Nabi dan praktek yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama setelah masa Nabi Muhammad Saw. Fiqh siyasah maliyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dalam mensejahterakan rakyatnya.⁴⁷

Fiqh siyasah maliyyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam fiqh siyasah maliyyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.⁴⁸

Siyasah maliyyah aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kesejahteraan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa kepedulian yang harus di perhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari himpitan ekonomi.

⁴⁷Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273

⁴⁸Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), h. 91

Al-Qur'an yang mengatur secara langsung masalah baitulmal. Posisi baitul mal sangat penting, baitul mal merupakan lembaga keuangan pada zaman Rasulullah. Baitul bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama dalam pengeluaran dan pendistribusianya. Prinsip penting yang harus diperhatikan adalah bahwa pengelolaan tersebut harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan negara⁴⁹. Dalam masa pemerintahan khalifah peruntukan masalah-masalah ekonomi apa yang di hadapi umat muslim dalam sejarah pemerintahan Islam. Umat Islam harus memperhitungkan dan menetapkan kebutuhan negara dan warganya sebagai berikut:

1. Untuk orang-orang fakir miskin.
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan negara.
3. Untuk meningkatkan supremasi hukum.
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas.
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara.
6. Untuk pengembangan infrastruktur sarana/prasarana fisik.
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan dan kekayaan.⁵⁰

⁴⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*....h. 33

⁵⁰Agus Marlin, "Baitul Mal sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Memperlancar Aktivitas Prekonomian", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 6 No. 02 (2014), h. 40-41